

Kesehatan Mental Wanita Afghanistan Memburuk Sejak Taliban Berkuasa

written by Ahmad Fairozi



Harakatuna.com. Islamabad - Menurut laporan bersama dari tiga lembaga PBB yang dirilis pada Selasa (19/9/2023), kesehatan mental wanita Afghanistan yang telah menderita di bawah tindakan keras yang diberlakukan Taliban sejak mengambil alih kekuasaan dua tahun lalu, telah memburuk di seluruh negeri.

“Hampir 70 persen melaporkan bahwa perasaan cemas, isolasi, dan depresi telah tumbuh secara signifikan lebih buruk antara April dan Juni, meningkat dari 57 persen pada kuartal sebelumnya,” menurut laporan dari Wanita PBB, Organisasi Internasional untuk Migrasi dan Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan.

Dilansir dari AP News, Rabu (20/9/2023), wanita Afghanistan diwawancarai secara online, secara langsung dan dalam konsultasi kelompok serta melalui

survei jarak jauh individu. Secara total, 592 wanita Afghanistan di 22 dari 34 provinsi Afghanistan ambil bagian.

Para wanita berbicara tentang menderita masalah psikologis termasuk depresi, insomnia, kehilangan harapan dan motivasi, kecemasan, ketakutan, agresi, isolasi dan perilaku yang semakin isolasionis, dan pikiran untuk bunuh diri.

Taliban, setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021 karena pasukan Amerika Serikat dan NATO menarik diri dari negara itu setelah dua dekade perang.

Taliban sebelumnya menjanjikan pemerintahan yang lebih moderat daripada selama periode kekuasaan mereka sebelumnya pada 1990-an, Tetapi mereka malah memberlakukan tindakan keras, dan banyak dari aturan mereka menargetkan wanita.

Mereka telah melarang perempuan dari sebagian besar bidang kehidupan dan pekerjaan publik dan melarang anak perempuan pergi ke sekolah di luar kelas enam.

Mereka telah melarang wanita Afghanistan bekerja di organisasi lokal dan non-pemerintah. Larangan itu diperpanjang untuk karyawan PBB pada April lalu.

Peluang untuk belajar terus menyusut karena pendidikan berbasis komunitas oleh organisasi internasional dilarang dan inisiatif sekolah berbasis rumah secara teratur ditutup oleh otoritas de facto, istilah yang digunakan oleh PBB untuk pemerintah Taliban.

Afghanistan adalah satu-satunya negara di dunia dengan pembatasan pendidikan perempuan dan hak-hak perempuan dan anak-anak Afghanistan ada dalam agenda Majelis Umum PBB di New York.

Juru bicara Taliban tidak segera tersedia untuk mengomentari laporan itu pada hari Selasa, tetapi di masa lalu pejabat Taliban telah mengutip hukum Syariah, atau Islam, untuk mendukung kebijakan mereka mengenai perempuan dan anak perempuan.

Bulan lalu, Mohammad Sadiq Akif, juru bicara Kementerian Kebajikan dan Kebajikan Taliban, mengatakan bahwa wanita kehilangan nilai jika pria dapat melihat wajah mereka yang terbuka di depan umum.

Mereka telah melarang perempuan dari sebagian besar bidang kehidupan dan pekerjaan publik dan melarang anak perempuan pergi ke sekolah di luar kelas enam.

Mereka telah melarang wanita Afghanistan bekerja di organisasi lokal dan non-pemerintah. Larangan itu diperpanjang untuk karyawan PBB pada April lalu.

Peluang untuk belajar terus menyusut karena pendidikan berbasis komunitas oleh organisasi internasional dilarang dan inisiatif sekolah berbasis rumah secara teratur ditutup oleh otoritas de facto, istilah yang digunakan oleh PBB untuk pemerintah Taliban.

Afghanistan adalah satu-satunya negara di dunia dengan pembatasan pendidikan perempuan dan hak-hak perempuan dan anak-anak Afghanistan ada dalam agenda Majelis Umum PBB di New York.

Juru bicara Taliban tidak segera tersedia untuk mengomentari laporan itu pada hari Selasa, tetapi di masa lalu pejabat Taliban telah mengutip hukum Syariah, atau Islam, untuk mendukung kebijakan mereka mengenai perempuan dan anak perempuan.

Bulan lalu, Mohammad Sadiq Akif, juru bicara Kementerian Kebajikan dan Kebajikan Taliban, mengatakan bahwa wanita kehilangan nilai jika pria dapat melihat wajah mereka yang terbuka di depan umum.

Wanita Afghanistan secara khusus mendesak komunitas internasional untuk melanjutkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Taliban, termasuk dengan tidak memberikan pengecualian untuk larangan perjalanan.

Mereka mendesak peningkatan keterlibatan dengan Taliban dalam kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, termasuk dengan melibatkan komunitas dan pemimpin agama dalam upaya kesadaran dan advokasi.

Para wanita mengatakan mereka menginginkan dukungan untuk inisiatif yang menyediakan konseling dan layanan psikologis dan mereka menginginkan akses ke beasiswa internasional dan pilihan migrasi yang aman bagi wanita dan anak perempuan untuk belajar dan bekerja di luar negeri.